

## PERAN PELATIHAN PENGUATAN TOLERANSI SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Muhammad Japar<sup>1</sup>, Irawaty<sup>2</sup>, Dini Nur Fadhillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

e-mail: mjapar@unj.ac.id

### ABSTRACT

The results of observations in several junior high schools in Jakarta showed that in the current global era the presence of millennial generation cultural values, a person needs a strong controller to be able to choose and sort out the values freely offered. That is necessary to strengthen social tolerance, especially for teachers in Junior High School. The activity was carried out in order to establish a tolerant attitude, especially in instilling multicultural values such as democracy, justice, equality, tolerance and respect for diversity. As well as improving the ability of teachers to provide reinforcement of social tolerance in the learning of Civic Education in junior high school. The method used to strengthen social tolerance of Civic Education learning is through training that is guided by experienced instructors. The evaluation used to measure the success of this training can be seen through the training activity evaluation questionnaire that was filled in by all the training participants. The target audience for this training activity are Civic Education teachers in Junior High School at Jakarta. The results of this training show that in the cultivation of social tolerance there are several attitudes that must be taken, namely: harmonious interaction, instilling brotherhood, instilling caring attitude, collaborative attitude. It is expected that the planting of social tolerance provided by Civic Education teacher to students can achieve Civic Education vision of building smart and good citizens. Furthermore, by cultivating sustainable tolerance it will build tolerant citizens. Because citizens who are intellectually intelligent, both emotionally and actively building a country for a better Indonesia.

**Keywords:** *strengthening social tolerance, civic education teacher, junior high school*

### PENDAHULUAN

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetap satu jua yang menandakan bahwa warga Negara Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan multikultural terbesar. Sesuai dengan Permendagri No.56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan seluruh Indonesia bahwa terdapat 34 Provinsi. Lebih dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia hidup di dalam *Unity in Diversity*. Sering kita mendengar kata *Unity in Diversity*. Kata tersebut bermakna persatuan didalam perbedaan. Maka dari itu Indonesia juga merupakan negara di mana fondasi utama untuk hidup adalah agama yang terkandung dalam sila Pancasila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang ada di Indonesia Kristen Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan Islam. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan yang

historis dan sosial. Keunikan budaya yang beragam ini memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Konsep Bhineka Tunggal Ika memerlukan pemantapan yang kuat ditunjukkan oleh beberapa kasus intoleran yang mengatasnamakan keberagaman seperti kasus bom Bali, Poso, Ambon hingga terakhir kasus di Jakarta pasca Pilkada. Masalah toleransi dan kerukunan hidup antar umat bergama di Indonesia sudah sejak awal mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.

Toleransi didefinisikan oleh Sullivan, Pierson dan Marcus yang dikutip oleh Saiful Mujani (2007:162) "*a willingness to put up with those things one rejects or opposes*", yakni kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang seseorang. Suyati Sidharta (2009:14) menuliskan toleransi merupakan kualitas sikap membiarkan adanya adat-istiadat dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dengan pemahaman tersebut sebagai manusia kita harus memiliki sikap menghargai sebuah perbedaan.

Mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi, Kevin Osborn menyatakan bahwa toleransi merupakan salah satu pondasi terpenting dalam demokrasi (Osborn, 1993:11). Toleransi sosial merupakan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat di dalam lingkungan sosial. Zainal Asril (2010:77) memberikan pemahaman mengenai penguatan merupakan respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Sehingga, penguatan dapat diartikan pula sebagai bentuk penghargaan yang tidak selalu berwujud materi melainkan bentuk kata-kata, senyuman, anggukan maupun sentuhan. Berbeda dengan fokus Udin S. Winatapura (2005:18) mengenai penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penguatan merupakan sebuah respon yang baik. Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa penguatan toleransi sosial adalah respon terhadap tingkah laku positif tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat di dalam lingkungan sosial yang dapat membuat terulang tindakan toleransi tersebut karena dianggap baik.

Syaiful Bahri Djamarah (2005:118) menyatakan terdapat lima tujuan penguatan yang positif yaitu pertama mampu meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar apabila pemberian digunakan secara selektif. Kedua memberi motivasi pada siswa dalam proses pembelajaran, ketiga dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu dan meningkatkan cara belajar produktif. Keempat mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri dalam belajar. Kelima mengarahkan terhadap pengembangan berfikir yang berbeda dalam pengambilan inisiatif yang bebas. Sehingga tujuan penguatan ini mampu memberikan respon positif terhadap penerimannya dan menjadikan tindakan tersebut dapat terulang karena memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dalam melakukan penguatan toleransi sosial, perlu adanya prinsip-prinsip. Diana (2011:153-155)

mengemukakan bahwa dalam mengembangkan sikap toleransi diperlukan memperhatikan prinsip-prinsip yaitu dilakukan dengan penuh kasih sayang, dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan, menggunakan pendekatan pengembangan, melakukan kegiatan bermain yang bermakna dan siswa merasa dihargai, menyediakan kesempatan bagi anak untuk melakukan tindakan moral secara nyata dan menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk mengembangkan karakter yang baik tanpa tekanan. Untuk itu dalam melakukan penguatan toleransi sosial diperlukan mengingat tujuan penguatan dan prinsip toleransi sosial agar siswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat (PTAI, 2009:1-10). Untuk itu Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai bentuk persiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011:28). Di Indonesia, PPKn memiliki pengertian sebagai *citizenship education* secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sehingga sampai saat ini PPKn telah menjadi bagian inheren dari sebuah instrumentasi serta praksis pendidikan nasional dalam empat status yaitu sebagai mata pelajaran di sekolah baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. PPKn juga sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi, serta sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. PPKn sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, dan ketiga.

PPKn telah berkembang menjadi kajian keilmuan yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Dan secara konseptual PPKn diyakini mampu berperan sebagai pendidikan demokrasi dengan ketiga dimensi konseptualnya secara interkatif yakni “kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler kewarganegaraan dan interaksi *social-cultural* kewarganegaraan” (Winataputra, 2015:177). Atas dasar itulah PPKn menjadi mata pelajaran penting di dalam pendidikan di Indonesia. Untuk itulah pembelajaran PPKn merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain intruksional untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar (Dimiyanti dan Mudjiono, 2011:62). Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar.

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran PPKn merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk mempermudah suatu proses pembelajaran PPKn yang merupakan ilmu pendidikan yang mengajarkan tentang demokrasi dan memiliki tujuan agar warga negara mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Pembelajaran PPKn juga untuk membentuk karakter ataupun kepribadian siswa agar mampu berpikir kritis, analisis, cerdas, terampil dan

bersikap demokrasi yang berani memberi pendapat serta mau menerima dan menghargai pendapat orang lain dan berjiwa besar yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Misi pembelajaran PPKn diharapkan siswa menjadi warga negara yang mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kaelan (2013:3) menyatakan bahwa tujuan PPKn untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan filsafat bangsa Pancasila. Sehingga siswa tidak hanya mampu memahami pengetahuan mengenai etika dan moral berkala namun yang terpenting adalah siswa dapat dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Stev (2013:56) menuliskan bahwa kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia ditimbulkan oleh kekerasan karena perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai yang menjadi pertentangan umat manusia. Valinda (2017:18) menambahkan bahwa di dalam kelompok masyarakat Indonesia, konflik dapat disebabkan karena faktor harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Kemudian adanya perbedaan pendirian atau sikap, perbedaan kebudayaan dan benturan kepentingan juga ikut menjadi timbulnya konflik. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial harus bergaul bukan hanya dengan kelompok sendiri tetapi juga dengan kelompok lainnya. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Lengsernya Soeharto dan kenaikan pemerintah reformasi Habibie dan pemerintah Abdurrahman Wahid, kekerasan fisik dan beberapa format pembunuhan massal sudah berlangsung di bagian tertentu provinsi Indonesia. Beberapa kasus besar salah satunya Jawa Timur yang mayoritas Muslimnya menganut tradisi NU (Nadlatul Ulama), menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah.

Abu Hapsin, Komarudin dan M. Arja Imroni (2014) menuliskan urgensi regulasi penyelesaian konflik umat beragama, perspektif tokoh lintas agama. Bahwa faktor penyebab terjadinya konflik yang menimbulkan intoleransi dikarenakan pluralisme dan diskriminasi. Untuk itu penting sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga kerukunan beragama. Akses teknologi yang mudah membuat masyarakat semakin antusias dalam mengomentari dan melakukan share kembali isu-isu agama. Sejak republik ini terbentuk, kekerasan dan konflik semakin meningkat. Konflik lainnya adalah antara warga Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah yang berkembang menjadi taretnis.

Dalam waktu seminggu, jumlah korban yang tewas dari etnis Madura tercatat 315 orang (Mahfud, 2009:128). Konflik Sampit menunjukkan bahwa adanya daftar konflik bernuansa SARA(Suku, Agama, Ras dan Golongan) di tanah air. Di era *millenial* saat ini, konflik intoleransi justru terjadi di media sosial. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Agung Maryoto mengatakan bahwa jajarannya telah mengungkapkan 13 kasus penyebaran berita bohong terhadap ulama (Kompas.com:2018). Kejadian ini menimbulkan spekulasi dan memancing intoleransi beragama. Teknologi yang semakin canggih membuat informasi dengan cepat. Komunikasi melalui media sosial menciptakan sebuah komunitas dengan cepat karena ada ketertarikan yang sama akan suatu hal. Dari banyak studi

penyebab lemahnya toleransi masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan pemaknaan tentang adanya sebuah toleransi yang menjunjung tinggi sebuah perbedaan Pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan (Andersen, Cusher, 1994:320).

Di era global saat ini hadirnya nilai-nilai budaya generasi *millenial*, seseorang memerlukan pengendali yang kuat agar mampu memilih dan memilah nilai-nilai yang secara bebas ditawarkan. Untuk itu diperlukan penguatan toleransi sosial khususnya kepada guru-guru di SMP (Sekolah Menengah Pertama). PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan mata pelajaran yang juga dibebankan dalam membentuk sikap toleran terutama dalam menanamkan nilai-nilai multikultural seperti demokrasi, keadilan, kesetaraan, toleransi dan menghormati keberagaman. Untuk itu PPKn berperan dalam menanamkan nilai-nilai multikultural untuk membentuk warga negara muda yang toleran (Mariyani, 2018:61). Latar belakang ini bertujuan untuk penulis menyelenggarakan pelatihan Penguatan Toleransi Sosial dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Guru di SMP (Sekolah Menengah Pertama).

## **METODE**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam penanaman toleransi sosial dalam pembelajaran PPKn, pelatihan dilakukan beberapa langkah yaitu: 1) bertemu dengan pengurus MGMP PPKn DKI Jakarta untuk mengidentifikasi pemahaman toleransi sosial siswa, 2) merumuskan strategi yang tepat dalam pelatihan yang akan dilaksanakan. Curah pendapat, presentasi, diskusi dan praktik memberikan pemahaman toleransi sosial kepada siswa, 3) melaksanakan pelatihan dengan melibatkan guru-guru PPKn SMP Se-DKI Jakarta yang tergabung dalam MGMP, 4) mempraktikkan langsung hasil pelatihan, 5) melaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan pelatihan, 6) melakukan wawancara terhadap lima guru mengenai toleransi sosial

Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari yaitu peserta pelatihan diberikan materi mengenai penguatan toleransi sosial dalam pembelajaran PPKn, kebijakan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, dan penguatan penilaian dalam kurikulum 2013.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui pertemuan dengan pengurus MGMP PPKn serta melakukan wawancara terhadap beberapa guru PPKn SMP DKI Jakarta. Kemudian melakukan observasi di kelas tepatnya di SMP N 47. Selanjutnya pelatihan penguatan toleransi sosial dan wawancara kembali terhadap guru terkait dengan pelatihan yang sudah dilaksanakan. Wawancara dilakukan selama 10 – 30 menit. Lokasi kegiatan berada di Aula Bung Hatta Universitas Negeri Jakarta. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara mengenai toleransi sosial, sekolah menjadi payung utama bagi siswa untuk menanamkan toleransi sosial. Indonesia terkenal dengan keramahan dan kesopanannya kepada masyarakat lainnya. Untuk menjaga sikap tersebut menanamkan sikap toleransi sosial sangatlah penting. Adanya sikap toleransi dapat melahirkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk



agama. Bagaimana cara menanamkan penanaman toleransi sosial di era-*millennial* saat ini? Sebelum memahami mendalam langkah-langkah tersebut, toleransi merupakan bermurah hati dalam pergaulan, sabar, tenggang rasa, bersikap membiarkan atau memberikan kebebasan kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi antar umat beragama berarti membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain. Poerwadarminta (1995) menyatakan bahwa toleransi merupakan sikap menghargai kita dapat memahami bahwa yang disebut toleransi ialah bermurah hati dalam pergaulan, sabar, tenggang rasa, bersikap membiarkan atau memberikan kebebasan kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri. sedangkan toleransi antar umat beragama berarti membiarkan orang lain mempunyai keyakinan lain. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Umum. Karena sekolah ini memberikan siswa kesempatan untuk dapat menghargai sebuah perbedaan.

Dalam proses pembelajaran, perilaku siswa seperti jahil, suka *membully*, mencela, kemudian lemah dalam konsentrasi, memanfaatkan keakraban dengan guru, lemah orientasi dan penggunaan *gadget* yang berlebihan. Perilaku siswa tersebut disampaikan oleh narasumber yang selanjutnya dibenarkan oleh hampir seluruh peserta pelatihan. Tidak sampai disitu, perilaku siswa juga terkadang dipengaruhi oleh perilaku guru yang terkadang melakukan *labelling* negative terhadap siswa, memberikan ekspresi marah yang berlebihan, mengancam siswa terkait nilai. Sebenarnya tanpa disadari guru juga pernah terlambat masuk kelas. Relasi sosial antara guru dan siswa yang tidak edukatif serta netralitas guru dalam menyikapi konstelasi politik. Ketidakadilan terhadap siswa juga pernah ditunjukkan oleh guru dan sering kali guru melupakan pujian untuk siswa.

Perilaku tersebut menjadi beberapa bahan untuk melanjutkan pelatihan penanaman toleransi sosial ini. Guru PPKn sejatinya sudah memahami mengenai toleransi. Namun, masih banyak diantara mereka yang hanya mengerti secara teori. Perilaku masyarakat juga mempengaruhi toleransi siswa. Seperti emosional dan reaktif dalam menghadapi masalah sosial. Mudah mengutarakan kekesalan dan ketidaksukaan terhadap orang lain melalui media sosial. Masih ada beragama ritual dan sulit menerima perbedaan. Serta media massa dan media sosial yang kurang mencerdaskan. Keluarga juga menjadi tempat belajar siswa pertama dalam mengenal toleransi sosial. Namun, ada beberapa keluarga yang cenderung otoriter, penanaman norma yang inkosisten, keteladanan yang rendah, dan penanaman visi yang lemah. Masalah intoleransi yang muncul seperti tidak menghargai perbedaan, tidak menjaga kerukunan dan mudah menyinggung SARA melalui media sosial. Adanya perbedaan pendirian atau sikap, perbedaan kebudayaan dan benturan kepentingan ikut menjadi sebab timbulnya konflik (Valinda 2017:18 ) hal inilah yang sering kali muncul terhadap masyarakat khususnya di DKI Jakarta.

### **Penanaman Toleransi Sosial**

Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial harus bergaul bukan hanya dengan kelompok sendiri tetapi juga dengan kelompok lainnya. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir dan beragama. Toleransi sosial merupakan sikap dan tindakan yang menghargai

keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat di dalam lingkungan sosial. Dari hasil pelatihan mengenai penanaman toleransi sosial ada beberapa sikap yang harus dilakukan yaitu:

1. Melakukan interaksi yang harmonis

Untuk mewujudkan toleransi sosial yang baik, maka dimulai dengan melakukan interaksi baik di sekolah, lingkungan masyarakat maupun keluarga secara harmonis. Dengan cara berpikir positif dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Di dalam kelas, guru dapat melakukan interaksi dengan siswa mulai dari memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa dan tidak sungkan untuk memuji siswa.

2. Menanamkan sikap persaudaraan

Sikap persaudaraan ini diperlukan untuk mewujudkan sikap toleransi sosial. Hal kecil yang dapat dilakukan dikelas dengan melakukan diskusi, maupun tugas kelompok. Di dalam kelas guru PPKn dapat menciptakan sikap persaudaraan diantara siswa. Wujud sikap ini juga dapat diimplementasikan dengan menganggap bahwa semua siswa adalah saudara apapun latar belakang agamanya.

3. Menanamkan sikap peduli

Sekolah menjadi tempat siswa untuk dapat bersosialisasi dengan teman sebaya. Sikap perduli yang dapat ditanamkan oleh guru PPKn yaitu dimulai dengan absensi. Jika ada siswa yang tidak masuk mereka siswa lain sudah seharusnya mengetahui alasannya. Bila temannya sakit maka mereka disarankan untuk menjenguk. Guru juga dapat menanamkan sikap perduli melalui contoh-contoh dari materi yang dijelaskan. Sikap peduli juga dapat diimplementasikan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk siswa membantu guru.

4. Sikap suka bekerjasama

Kurikulum 2013, mengarahkan siswa untuk berfikir ilmiah. Sehingga siswa diharuskan melakukan pengamatan, menganalisis dan mempresentasikan. Di dalam kelas, siswa terbiasa untuk melakukan penyelesaian tugas dalam bentuk kelompok.

Perlu diingatkan bahwa konsep klasik mengenai guru adalah guru mengantarkan siswa untuk menjadi orang dewasa. Untuk itu penting guru dalam menanamkan sikap-sikap positif kepada siswa. Sebagai guru, penanaman toleransi sosial diperlukan beberapa keterampilan seperti bertanya kepada siswa tanpa ada diskriminasi, memberi penguatan tentang materi yang diajarkan, mengadakan variasi dalam proses pembelajaran. Guru juga harus memiliki keterampilan menjelaskan yang baik, sehingga siswa mampu memahami. Pengelolaan kelas, membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil serta membuka dan menutup pembelajaran merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Pada dasarnya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang terkandung unsur saling memberi dan menerima (Tirtarahardja, 1994:18) maka dari itu interaksi yang harmonis dapat membantu siswa untuk dapat berkomunikasi secara baik tanpa memandang latar belakang ras maupun agama. Pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk meminimalisir intoleransi. Siswa juga harus belajar menghormati ketika temannya melaksanakan ibadah, menghormati dan memberikan kesempatan kepada temannya untuk mengerjakan tugas dan menghormati latar belakang suku, ras maupun agama.

## Pendekatan Pembelajaran dalam Menanamkan Toleransi Sosial

Guru PPKn dalam menanamkan toleransi sosial, membutuhkan pendekatan pembelajaran seperti berpusat pada siswa. Sehingga tidak lagi dengan *teacher center*. Guru juga perlu mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan siswa karena setiap siswa adalah unik dan memiliki hak untuk berkembang. Pendekatan yang konstruktivistik dapat memberi ruang luas siswa dalam membangun kompetensinya. Serta jawaban multidimensi lebih memberi kesempatan siswa untuk berkembang daripada jawaban tunggal. Memberik kesempatan siswa untuk belajar, berlatih dan membiasakan bekerjasama merupakan pendekatan yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Karena sekolah sebagai laboratorium demokrasi yang membangun toleransi.

Tilaar (1996:76) menuliskan bahwa masyarakat sekolah harus merupakan masyarakat bermoral dan secara keseluruhan budaya sekolah adalah budaya yang bermoral. Pelatihan penanaman toleransi sosial ini sejalan dengan maksud Tilaar. Diharapkan dengan penanaman toleransi sosial yang diberikan oleh guru PPKn kepada siswa dapat mencapai visi PPKn yaitu membangun warga negara yang cerdas dan baik. Selanjutnya dengan penanaman toleransi yang berkesinambungan maka akan terbangun warga negara yang toleran. Karena warga negara yang cerdas secara intelektual, baik secara emosional dan aktif membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Beberapa model pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam penanaman toleransi sosial seperti:

### a. *Group Investigation*

Model ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan masalah moral dan sosial siswa dapat diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama. Hal ini dapat mewujudkan sikap menanamkan suka bekerjasama dan interaksi yang harmonis. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendefinisikan masalah, melakukan eksplorasi, mengumpulkan data, mengembangkan dan menguji hipotesis

### b. *Role Playing*

Model ini dapat digunakan untuk membantu guru dalam membimbing siswa mengumpulkan data dan mengorganisasikan isu-isu moral dan sosial, Kemudian mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain sehingga mereka dapat berupaya memperbaiki keterampilan sosial. Model ini memberikan siswa kesempatan untuk memecahkan berbagai konflik dan mengambil peran serta mengamati perilaku sosial. Dengan model ini, guru dapat mewujudkan sikap menanamkan persaudaraan dan sikap perduli.

### c. *Jurisprudential Inquiry*

Model ini dapat membuat siswa lebih peka terhadap masalah sosial (Japar, 20187:54). Dalam model ini siswa dilibatkan dalam masalah-masalah sosial yang menuntut pembuatan kebijakan pemerintah yang diperlukan serta berbagai pilihan untuk mengatasi isu seperti konflik intoleransi, moral dan sikap sosial lainnya. Pertanyaan Jurisprudential adalah pembelajaran model yang kompatibel dengan materi hak asasi manusia untuk mengembangkan karakter toleransi kepada siswa. Itu berarti mengakui persamaan, persamaan hak dan manusia dasar



kewajiban tanpa perbedaan ras, keturunan, agama, keyakinan, jenis kelamin, status sosial, dan warna kulit dan sebagainya.

Keberhasilan dari pelatihan ini yaitu narasumber dan partisipan sama-sama memiliki pemahaman bahwa penanaman toleransi sosial perlu diimplementasikan kepada siswa. Pelatihan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi di dalam kelas (peserta, 2018). Toleransi sosial yang dilakukan siswa misalnya saat bulan Ramadhan ketika siswa muslim berpuasa, siswa yang tidak berpuasa menghargai dengan tidak makan didepan siswa yang berpuasa (peserta, 2018). Pelatihan penanaman toleransi sosial ini dapat mengingatkan kembali tugas guru dalam membantu siswa untuk menjadi dewasa dan memiliki moral (peserta, 2018). Hasil ini juga dilihat dari penilaian partisipan mengenai substansi pelatihan 84.7 persen partisipan menyatakan baik sekali. Dari aspek pembicara 93.2 persen menyatakan baik sekali, kemudian dari aspek layanan 76.2 persen menyatakan baik sekali dan hampir 79.8 persen menyatakan sarana dan prasarana yang disediakan baik sekali.

## KESIMPULAN

Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan yang historis dan sosial. Keunikan budaya yang beragam ini memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Di era global saat ini hadirnya nilai-nilai budaya generasi *millenial*, seseorang memerlukan pengendali yang kuat agar mampu memilih dan memilah nilai-nilai yang secara bebas ditawarkan. Untuk itu diperlukan penguatan toleransi sosial khususnya kepada guru-guru di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta. Pelatihan ini menarik untuk guru-guru SMP N DKI Jakarta karena jumlah peserta yang mencapai 236 guru dari seluruh wilayah di DKI Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2018. Dari hasil pelatihan mengenai penanaman toleransi sosial ada beberapa sikap yang harus dilakukan yaitu: Melakukan interaksi yang harmonis, Menanamkan sikap persaudaraan, Menanamkan sikap peduli, Sikap suka bekerjasama. Diharapkan dengan penanaman toleransi sosial yang diberikan oleh guru PPKn kepada siswa dapat mencapai visi PPKn yaitu membangun warga negara yang cerdas dan baik. Selanjutnya dengan penanaman toleransi yang berkesinambungan maka akan terbangun warga negara yang toleran. Karena warga negara yang cerdas secara intelektual, baik secara emosional dan aktif membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, R. dan Cusher, K. 1994. *Multicultural and intercultural studies, dalam Teaching Studies of Society and Environment* (ed. Marsh,C.). Sydney: Prentice-Hall.
- Asril, Zainal. 2010. *Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imroni, M. Arja, Hapsin, Abu dan Komarudin. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama. *Dakwah Multikultural* 22(2).
- Japar, M. 2017. Jurisprudential Inquiry sebagai model pembelajaran alternative untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 27 (1), 49-59.
- Japar, M. Fadhillah, D.N. 2018. Do We Need to Learn about Human Rights Values? Jurisprudential Inquiry Model of Teaching in Senior High School. *Advances on Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press* 164.
- Jary, D. dan J. Jary. 1991. 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper.
- Kompas.com. 2018. *Polda Jabar Tangkap 7 Pelaku Penyebar Hoaks Penganiayaan Ulama*. <https://regional.kompas.com/read/2018/02/23/16362751/polda-jabar-tangkap-7-pelaku-penyebar-hoaks-penganiayaan-ulama>, Diakses tahun 2018.
- Mahfud, C. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariyani. 2018. Peran PPKn dalam Menanamkan Nilai-Nilai Multikultural untuk Membentuk Warga Negara Muda yang Toleran. *Jurnal Ilmu Pendidikan PPKn & Sosial Budaya* 2 (1).
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Osborn, Kevin. 1993. *Tolerance*. New York.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan seluruh Indonesia.

- Reed, I. 1997. *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin.
- Rumagit, Stev Koresy. 2013. Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence. Perkembangan Remaja. Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Siswati, Valinda. 2017. Masyarakat dalam keberagaman analisis konflik dan pemecahannya. *Falasifa* 8(7).
- Tilaar, H. A. R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategis Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Tirtarahardja, U. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Tim konsorsium 7 PTAI. 2009. *Bahan Perkuliahan Pembelajaran PPKN MI*. Surabaya: LAPIS PGMI.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahana, Heru Dwi. 2015. Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Millennial dan Budaya Sekolah terhadap Ketahanan Individu. *Jurnal Ketahanan Nasional* 21 (1) Hal.14-22.
- Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism. Buckingham-Philadelphia: Open University Press*.
- Winataputra, Udin S.,dkk. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis Epistemologis dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Banten: Universitas Terbuka.